BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

2.1. Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero)

Pos Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, sudah lama berdiri dan beroperasi seiring dengan laju perjuangan bangsa Indonesia sampai sekarang. Hal ini membuktikan bahwa Pos Indonesia sudah memiliki pengalaman yang sangat luas dan telah berhasil melalui berbagai rintangan sampai akhirnya tiba di abad 21 ini.

Suatu hal yang patut dibanggakan, karena perjalanannya yang sangat panjang membawa Pos Indonesia sebagai perusahaan yang sangat besar. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sejarah perusahaan dari berbagi periode sampai sekarang, dapat kita lihat pada uraian berikut ini.

- **Masa Kompeni *Bataafsche* Republik (1700-1808)**

Pada permulaan masa kompeni pengiriman surat dilakukan melalui laut yang diangkut oleh pencalang (perahu berukuran besar) yang berlayar tanpa jadwal yang tetap. Pada masa itu pengiriman surat melalui darat belum dapat dilakukan karena masih banyak daerah yang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Indonesia pada waktu itu. Pada tahun 1575 pengiriman surat berjalan dengan teratur sebanyak dua minggu sekali antara Batavia, Cirebon, dan Bandung. Kantor Pusat pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G. W Van Imhoff.

- **Masa Pemerintahan Deandels (1808-1811)**

Pada masa pemerintahan Deandels, pengantaran surat-surat dan berita-berita dilakukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan kuda yang disertai dengan petunjuk jalan. Perkembangan selanjutnya pengiriman surat dilakukan dengan kereta pos pada jalan yang sudah baik. Pada waktu lalu lintas surat menyurat dan berita berjalan dengan tertib.

- **Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816)**

Pada permulaan masa pemerintahan Inggris, dimana Rafless sebagai *Luitnant Government*, tidak terjadi penambahan-penambahan didalam peraturan-peraturan pos. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1813 dikeluarkan peraturan baru yang disebut *"Regulation For The Establishment on Island of Java"*.

- **Masa Pemerintahan Belanda (1816-1942)**

Pada masa pemerintahan Belanda ini, pengantaran pos dengan menggunakan kuda dan kereta dilakukan kembali seperti pada masa Deandels. Tetapi pengantaran pos bukan lagi monopoli pemerintah, karena raja mengatur urusan posnya sendiri.

Pada periode ini, perkembangan pos telah mengukir sejarah baru, tepatnya pada tahun 1840, Sir Rowland Hill dari Inggris mengusulkan untuk pesamaan tarif yang disebut "Penny Pos" yaitu sejumlah Penny untuk tiap-tiap surat dalam negeri. Penny Pos ini merupakan prangko pertama yang diciptakan oleh Sir Rowland Hill dengan nama *"The Penny Black"*, yaitu prangko bergambar Ratu Elizabeth dengan tulisan *"One Penny"*.

Pada tahun 1874 diadakan pertemuan Pos Internasional yang bertempat di Bern-Swiss, yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dari dua negara peserta organisasi UPU (Universiles Postals Union). Pada tahun 1884 pemerintah kolonial Belanda selanjutnya mendirikan badan yang bernama *"Post and Telegraf Dienst"* yang bertujuan untuk mengelola lalu lintas berita dan informasi tertulis. Hal ini merupakan asal muasal dari PT. Pos Indonesia (Persero).

- **Masa Pemerintahan Jepang (1942-1945)**

Pada masa ini, tidak terdapat perkembangan yang berarti dalam bidang pos. Pada waktu Jepang memasuki Hindia Belanda, beberapa peralatan komunikasi radio diungsikan ke Bandung (Kantor Pusat), sedangkan peralatan komunikasi yang tidak sempat terbawa langsung dikuasai oleh Jepang. Adapun metode pengiriman dan penerimaan surat-surat kawat, dilakukan dengan dua tulisan, yaitu tulisan latin dan tulisan katakana.

Dalam organisasi diadakan perubahan sedemikian rupa, sehingga administrasi keuangan dipegang oleh pemerintah Jepang, sedangkan penyelenggaraan usaha dilakukan oleh maskapai telegraf yaitu *Kokusai Tsushin KK.*

Sampai dengan tahun 1944 hubungan telegraf berjalan seperti biasa, hanya kurangnya peralatan dan tidak diperbaikinya saluran darat pada tahun itu hubungan cepat Jakarta, Semarang, dan Surabaya terpaksa dihentikan.

- **Setelah Kemerdekaan**

a. *Periode Jawatan PTT (1945-1962)*

Pada awal tahun 1950 setelah perang kemerdekaan, jawatan PTT berusaha untuk memulihkan kembali kegiatan usahanya. Pada tahun 1953 lalu lintas pos, telegraf, dan telepon bertambah luas, jumlah pengiriman surat, kartu pos, dan lain-lainnya semakin meningkat.

Guna menyempurnakan pelayanan jawatan PTT kepada masyarakat dan untuk mengatasi kesulitan yang terjadi, juga untuk langkah-langkah lebih lanjut yang harus ditempuh guna lebih menyempurnakan pelaksanaan tugas jawatan sebagai alat penghubung bagi masyarakat dan pemerintah, maka berdasarkan UU No. 19/prp/1960 dan PP No. 240/1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 1961 dan berlaku tanggal 1 Januari 1962, status Jawatan PTT berubah menjadi PN Postel.

b. *Periode PN Postel*

Perubahan Jawatan PTT menjadi PN Postel diharapkan akan memperoleh kebebasan bergerak yang cukup luas dalam bidang keuangan, yang akan memberi kemungkinan lebih besar untuk memperbaiki nasib pegawai, memperbesar penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan akan perlengkapan guna memperlancar pelaksanaan tugas PN Postel, juga kemungkinan untuk mempererat hubungan dengan organisasi-organisasi buruh guna mendapatkan hubungan sosial dan pengawasan sosial.

Adapun tujuan dan lapangan usaha PN Postel ialah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan

kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan dalam menuju masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil.

Tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi dua, yaitu PN Pos dan Giro yang dibentuk dengan PP No. 29/1965 pada Lembaran Negara No. 62/1965 dan satu lagi menjadi PN Telekomunikasi yang dibentuk dengan PP No. 30/1965 pada Lembaran Negara dengan No. 63/1965 pada tanggal 6 Juli 1965. Pelaksanaan peralihan itu dilatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

c. *Periode PN Pos dan Giro (1965-1978)*

Mengenai nama PN Pos dan Giro (bukan nama yang lainnya), karena pada waktu itu Dinas Paket Giro dan Cekpos belum begitu dikenal karena baru dibuka pada tanggal 23 November 1961. Paket Giro dan Cekpos ini ditujukan untuk mempermudah atau mengkonsolidasikan sistem pembayaran yang ada. Oleh karena itu nama PN Pos dan Giro tersebut diharapkan dapat lebih memasyarakatkan Dinas Giro Pos yang dapat dijadikan saluran pembayaran yang serba guna, dengan harapan bahwa secara giral akan meningkatkan dana.

Dalam PP No. 29/1965 tujuan perusahaan dan sistem pertanggung jawaban, sama dengan yang tertera dengan PP No. 240/1961. Berdasarkan Inpres RI No. 17/1967 tentang pengarahan dan penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam tiga bentuk usaha negara yaitu :

- Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Jawatan, *(Departemental Agency)*
- Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Umum, *(Public Corporation)*

- ♣ Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan, *(Public State Company).*

d. Periode Perum Pos dan Giro (1978-1995)

Sebagai dasar pertimbangan mengapa bentuk ini yang dipilih dan dipergunakan ialah bahwa Dinas Pos dan Giro merupakan cabang produksi jasa yang paling penting serta merupakan fungsi vital sebagai prasarana pembangunan nasional. Disamping itu untuk lebih menyempurnakan dan mendayagunakan pengusahaan dan pengelolaan Dinas Pos dan Giro Pos semasa PN Pos dan Giro.

Perum Pos dan Giro mempunyai tugas pokok membangun, mengusahakan, mengembangkan pelayanan lalu lintas berita, informasi, barang dan uang guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat dalam menunjang pembangunan negara.

Dalam PP No. 9/1978 diterapkan bahwa tujuan Perum Pos dan Giro ialah membangun dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro pos guna mempertinggi kelacaran hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.

e. Periode PT. Pos Indonesia (Persero) (1995-Sekarang)

Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan pelayanan jasa pos serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan jasa Pos dan Giro, maka Perum Pos dan Giro dirubah statusnya menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) yang diatur melalui PP No. 5/1995 tertanggal 27 Februari 1995 tentang pengalihan status Perum Pos dan Giro menjadi

Perusahan Perseroan dengan nama PT. Pos Indonesia (Persero) yang telah resmi telah terdaftar dengan Akte Notaris Sutjipto, SH. No. 117/1995 tanggal 20 Juni 1995.

2.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

2.2.1. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan wadah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu organisasi terjadi interaksi antara anggotanya didalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan. Interaksi tersebut dapat terlihat dari struktur organisasi, dengan demikian struktur organisasi adalah pola aktivitas dan hubungan antar berbagai sub unit organisasi.

Struktur organisasi Asman Bina SDM-3 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung dalam melaksanakan kegiatannya memiliki 7 bagian, yaitu Administrasi pelaporan dan perpajakan, Administrasi rekapitulasi pajak, Administrasi rekapitulasi kantor pusat, Administrasi restitusi, Administrasi rekapitulasi wilayah, Administrasi rekapitulasi PUKK dan tagihan, Agenda.

2.2.2. Uraian Tugas

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut

1. Asman Pembinaan SDM-3
    a. Menyusun rencana pengembangan sisdu, jenis, dan besaran serta mengelola gaji dan emulemen pegawai termasuk Pph pasal 21

b. Tersedianya daftar pembayaran gaji dan emulemen lainnya secara akurat dan tepat waktu

c. Kelancaran pengurusan surat menyurat mengenai data gaji dan emulemen lainnya sesuai dengan kebutuhan

d. Tersedianya konsep peraturan terkait tugas pokok tepat waktu

2. Administrasi Pelaporan dan Perpajakan

a. Administrasi pelaporan dan perpajakan

b. Tata Usaha Barang –barang Inventaris

c. Administrasi Kepegawaian

3. Administrasi Rekapitulasi Pajak

a. Membuat Rekapitulasi PPh pasal 21 Honorarium, Lembur, Uang penghargaan, Restitusi Pengobatan dan Tunjangan Kesehatan

b. Juru Bayar

3. Administrasi Rekapitukasi Kantor Pusat

a. Membuat Rekapitulasi gaji dan emulemen lainnya pada Kantor Pusat

b. Membuat daftar kontraksi gaji dan emulamen lainnya pada Kantor Pusat

c. Membuat Surat Perintah Bayar (SPB) permintaan uang gaji dan emulemen lainnya dan SPB transfer ke BNI Posindo

d. Membuat daftar potongan pihak ketiga dan uang titipan bagian lokas

e. Juru Bayar

4. Administrasi Restitusi

a. Administrasi Rekapitulasi PUKK dan Tagihan

b. Administrasi pembayaran gaji

c. Juru Bayar

5. Administrasi Rekapitulasi Wilayah
   a. Administrasi Rekapitulasi Gaji dan emulemen penting lainnya seluruh Wilayah Usaha Pos
   b. Juru Bayar
6. Administrasi Rekapitulasi PUKK dan Tagihan
   a. Administrasi Restitusi Pengobatan dan pencatatan PPh pasal 21 atas Honorarium, Lembur, Uang Penghargaan dan lainnya
   b. Juru Bayar
7. Agenda
   a. Agenda
   b. Mencatat dan menyerahkan surat-surat (SKEP, Peg. 16. Lamp.6 dan 7) yang masuk atau keluar ke dan dari Sub Bagian Bina SDM-3

2.3. Aspek Kegiatan Perusahaan

Adapun aspek kegiatan dari PT. Pos Indonesia dalam memberikan jasa pada masyarakat, adalah :

- **Surat Pos**

Layanan standar pengiriman berita yang tersedia di semua kantor pos dengan tarif seragam, baik untuk perhubungan di dalam maupun luar negeri. Klasifikasi pengiriman jenis surat pos adalah : surat, kartu pos, warkat pos, barang cetakan, majalah, sekogram *(braille)*, dan bungkusan.

- **Surat Kilat**

Layanan untuk kiriman pos cepatdi dalam negeri *(urgent mail)* yangmenjangkau seluruh Indonesia dengan prioritas kecepatan dalam penyaluran dan pengantarannya.

- **Surat Kilat Khusus (SKH)**

Layanan terdokumentasi sebagai solusi tepat kiriman pos di dalam negeri sehingga dapat dilakukan jejak lacak guna mengetahui status kiriman. Jaringan SKH tersebar di lebih 220 kota di Indonesia dengan waktu tempuh antara 24 jam sampai dengan 48 jam.

- **Express Mail Service (EMS)**

Layanan cepat pengiriman berita atau barang sebagai solusi tepat kiriman pos internasional dengan fasilitas jejak lacak guna mengetahui status kiriman. Jaringan EMS tersebar luas ke dan dari 46 negara terkemuka dengan waktu tempuh antara dua sampai dengan lima hari.

- **Ratron**

Layanan Surat Elektronik untuk berbagai ucapan simpati. Hasil transfer data berupa pesan pribadi dalam bentuk surat atau kartu ucapan akan diantarkan kepada alamat yang dituju.

- **Surat Bisnis Elektronik (SBE)**

Layanan hibrida antara transmisi data elektronik dengan antara fisik surat pos. Jenis layanan ini sangat tepat untuk pengiriman surat atau berbagai jenis tagihan dalam jumlah besar sehingga merupakan solusi korespondensi masal. Proses pekerjaan yang dapat dilakukan SBE adalah mulai percetakan, pelipatan,

pemasukan ke dalam sampul dan pengeleman yang diproses secara komputerisasi dengan mesin kecepatan tinggi, sampai dengan pengantaran. Layanan SBE sementara baru terdapat di sentral pengolahan Pos Jakarta.

- **Wesel Pos**

Layanan transfer uang sebagai solusi kiriman uang keseluruh Indonesia. Tersedia beberapa jenis layanan wesel pos yaitu : Wesel Pos Biasa, Wesel Pos Kilat, Wesel Pos Khusus, Wesel Pos Elektronik (Westron), Wesel Pos Berlangganan, Wesel Pos Luar Negeri ke atau dari beberapa negara.

- **Giro Pos**

Layanan keuangan untuk menampung, menyimpan dan membayar berbagai transaksi, baik untuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan atau keperluan bisnis di seluruh Indonesia.

- **Cek Pos Wisata (CPW)**

Layanan keuangan sebagai solusi dana perjalanan karena dapat diuangkan di semua kantor pos. Tersedia beberapa harga nominal CPW mulai dari Rp 10.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-. Beberapa hotel, restoran, trafel biro dan tempat-tempat lainnya telah menerima CPW sebagai alat pembayaran.

- **Paket Pos**

Layanan pengiriman barang yang dapat dilakukan di semua kantor pos, baik untuk perhubungan dalam negeri maupun luar negei. Klasifikasi paket pos dapat dibedakan dari sara pengangkutannya yaitu :

  - Paket pos darat atau laut untuk perhubungan darat atau laut.
  - Paket pos udara untuk perhubungan udara.

Khusus untuk jalur lintas Sumatera, Jawa dan Bali, transportasi dilakukan oleh armada sendiri yang disebut "Armada Paket Pos".

- **Belanja Lewat Pos (BLP)**

Menyadari bahwa persebaran masyarakat yang sangat luas di seluruh Indonesia, PT. Pos Indonesia bekerja sama dengan mitra kerja menyediakan layanan BLP *(Mail Order)* sebagai solusi belanja jarak jauh berbagai produk. Manfaat bagi konsumen adalah mendapatkan produk-produk pilihan dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Deskripsi dan ilustrasi produk digelar dalam katalog atau brosur yang diterbitkan secara berkala. BLP juga memberikan manfaat yang positif bagi produsen, melalui BLP dapat langsung mengakses pasar nasional tanpa harus membangun jaringan distribusi sendiri.

- **Pon Plus**

Berbagai layanan dengan nilai tambah yang dikemas melalui sarana pelayanan Pon Plus sehingga dapat memberikan sulusi untuk semua jenis kiriman pos. Fleksibilitas dan kehandalan layanan adalah prioritas utama yang diberikan Pon Plus sehingga layanan pos lebih *"Customised"* sesuai dengan kebutuhan pelanggan, antara lain :

- Kiriman Hari Ini Sampai (KHIS)
- Kiriman Esok Sampai (KES)
- Penanganan khusus atas kiriman, termasuk tata cara pengeposan kiriman, pembayaran, dan pembuatan laporan atas penerimaan kiriman oleh alamat yang dituju

- **Filateli**

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkaya kazanah hobi mengumpulkan prangko atau filateli, telah dikembangkan pula produk-produk filateli yang lebih atraktif dengan tema penerbitan yang bervariasi. Menyadari bahwa filateli adalah benda koleksi yang banyak diminati oleh para penggemarnya, maka usaha bisnis filateli telah ditangani oleh satu divisi agar lebih fleksibel dan akrab dalam melangkah bersama filatelis dan masyarakat.

- **Wasantara – Net (W-Net)**

Layanan pertukaran informasi melalui internet sebagi solusi komunikasi bauk untuk lingkup dalam maupun luar negeri.

Sebagai jaringan komunikasi nasional, W-Net saat ini telah hadir di 31 kota besar di Indonesia. Titik layanan W-Net yang tersebar luas memberikan dampak efisiensi dalam mengakses informasi global. Masyarakat dapat mengakses W-Net melalui PC mereka atau apabila tidak memiliki PC mereka dapat mengaksesnya melalui fasilitas Warung Pos Internet (Warpos-*Cybercafe*) yang tersedia di kantor-kantor pos dan tempat-tempat lainnya.

- **Pos Serba Ada (Poserba)**

Pengembangan fasilitas pelayanan fisik loket kantor pos dengan mengacu pada konsep *one stop shopping*. Poserba hadir untuk melayanitugas segala kebutuhan tentang pos yang dikemas dalam tatanan baru untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang datang. Poserba menyediakan semua kebutuhan yang berhubungan dengan pos dan berbagai alat

tulis-menulis termasuk kartu ucapan dan benda filateli dalam kemasan khusus. Poserba berada baik di kantor pos maupun di tempat lain yang strategis.

- **Pos Pemasaran Keliling (Posarling)**

Perkayaan kapasitas pelayanan pengantar pos yang selain mengantarkan kiriman pos, juga ditambah sebagi pelayanan kebutuhan pos lainnya seperti penjualan benda pos dan materai, penerimaan pengiriman pos, sehingga lebih mendekatkan layanan pos kepada masyarakat. Posarling hadir mengunjungi masyarakat setiap hari dengan sepeda motor dan seragam khas serta dilengkapi dengan bunyi melodi yang menandai kehadiran posarling yang siap memberikan berbagai pelayanan pos.

- **Halo Pos – 161**

Kebutuhan masyarakat untuk selalu mudah menghubungi kantor pos melalui saluran telepon yang praktis diwujudkan dalam Halo Pos – 161 yang merupakan media informasi dan layanan pos. Nomor telepon tiga digit 1-6-1, mudah untuk diingat dan seragam di setiap kota yang dapat digunakan baik untuk permintaan informasi tentang layanan pos maupun dijadikan media ppermintaan untuk segera mendapatkan layanan pos, seperti penjemputan kiriman pos dan lain-lain.

Sarana Halo Pos – 161 menjadikan kantor pos selalu siap melayani setiap saat. Fasilitas ini ditujukan agar pelanggan hemat waktu, biaya dan upaya untuk selalu dekat dengan jangkauan pelayanan pos.

- **Layanan Keagenan**

Pelayanan jasa keagenan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu :

- Penabungan dan pembayaran untuk Bank Tabungan Negara
- Pemotongan pensiun ex bank kreditur
- Pembayaran pensiun TASPEN dan ASABRI
- Penjualan benda materai untuk Direktorat Pajak